



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penataan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat perubahan nomenklatur, serta perubahan tugas dan fungsi pada beberapa unit kerja dalam organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. bahwa perubahan nomenklatur serta perubahan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan penyesuaian klasifikasi arsip di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

The image shows the official seal of the Ministry of Economic Coordination of the Republic of Indonesia, featuring a Garuda bird in the center. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'I Ketut Hadi Priatna'.

I Ketut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

**KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

FUNGSI FASILITATIF

| | | |
|----|-------------|---|
| PR | PERENCANAAN | |
| | 01 | Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan |
| | 01 | Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/ <i>Master Plan</i> |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP. |
| | 02 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJM. |
| | 03 | Rencana Strategis (Renstra) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Renstra. |
| | 04 | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional |
| | | Naskah terkait penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. |
| | 02 | Perencanaan Kinerja dan Anggaran |
| | 01 | Penyiapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai dari pengumpulan bahan, pemrosesan dan penetapan Pagu Indikatif, Pagu Definitif Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). |
| | 02 | Rencana Kinerja Tahunan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |

| | | |
|----|---------------------------|--|
| | 03 | Inisiatif Baru |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Program dan Anggaran berdasar Inisiatif Baru. |
| | 03 | Penetapan Kinerja |
| | 01 | Menteri |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 02 | Pimpinan Unit Kerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja pimpinan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 04 | Revisi Dokumen Anggaran |
| | 01 | Revisi Dokumen Anggaran |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran. |
| | 02 | Anggaran Belanja Tambahan (ABT) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya ABT. |
| | 03 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya APBNP. |
| | 05 | Analisis Kebijakan Pembangunan |
| | 01 | Analisis dan Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan dan penyusunan rencana analisis dan harmonisasi kebijakan di bidang perekonomian. |
| | 02 | Pengembangan Kajian Kebijakan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengembangan kajian kebijakan di bidang perekonomian. |
| | 03 | Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan. |
| | 06 | <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| DI | DATA DAN SISTEM INFORMASI | |
| | 01 | Pengelolaan Data |
| | 01 | Pengumpulan Data |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses pengumpulan data di bidang perekonomian. |
| | 02 | Pengelolaan dan Penyajian Data |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengolahan dan penyajian data di bidang perekonomian. |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| | 02 | Sistem Informasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 01 | Rencana strategis/ <i>master plan</i> Pembangunan Sistem Informasi (SIM) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi meliputi penyusunan dan penetapan rencana strategis (<i>master plan</i>) pembangunan manajemen sistem informasi. |
| | 02 | Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen arsitektur dan implementasi aplikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta infrastrukturnya termasuk pengelolaan website. |
| | 03 | Perekaman dan Pemutakhiran Data |
| | | Naskah yang berkaitan dengan perekaman dan pemutakhiran data. |
| | 04 | Migrasi Sistem Aplikasi dan Data |
| | | Naskah yang berkaitan dengan migrasi sistem aplikasi dan data mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan migrasi. |
| | 05 | Dokumen <i>Hosting</i> |
| | | Naskah yang berkaitan dengan dokumen <i>hosting</i> . |
| | 06 | Layanan <i>Back Up</i> Data Digital |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan <i>Back Up</i> Data Digital. |
| AK | AKUNTABILITAS KINERJA | |
| | 01 | Perencanaan Kinerja |
| | 01 | Penyusunan Indikator Kinerja, Rencana Aksi dan Manual Indikator Kerja Utama (IKU) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan indikator kinerja, rencana aksi dan manual Indikator Kerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 02 | Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual Indikator Kerja Utama (IKU) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penetapan Perencanaan Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU antara pimpinan dan bawahan (Menteri, Eselon I, dan Eselon II) . |
| | 03 | Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Aksi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 02 | Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja |
| | 01 | Pengumpulan Data Capaian Kinerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data capaian kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |

| | | |
|----|------------------------|---|
| | 02 | Pengukuran Capaian Kinerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengukuran capaian kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 03 | Pengembangan Manajemen Kinerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengembangan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 03 | Pelaporan Akuntabilitas Kinerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 01 | Laporan Capaian Kinerja Berkala |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja periode bulanan, triwulan, dan semesteran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 02 | Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan pada unit Menteri, Eselon I, dan Eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 03 | Laporan Insidental/Capaian Kinerja Lainnya |
| | | Naskah yang berkaitan dengan publikasi data kinerja dari perencanaan kinerja sampai pada laporan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 04 | <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan analisis, <i>monitoring</i> , dan evaluasi kualitas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 01 | Pelaksanaan Evaluasi Kinerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan Pedoman dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 02 | Laporan Hasil Evaluasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan Hasil Evaluasi Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 03 | Pemanfaatan Hasil Evaluasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| EP | EVALUASI DAN PELAPORAN | |
| | 01 | Pemantauan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan pelaksanaan program-program di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 02 | Evaluasi Program |
| | 01 | Evaluasi Program Unit Kerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program unit kerja. |
| | 02 | Evaluasi Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |

| | | | |
|----|--------------|--------------------------|--|
| | | | Naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan seluruh program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 03 | Laporan | |
| | | 01 | Laporan Berkala |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja seperti laporan harian, laporan mingguan, bulanan, triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. |
| | | 02 | Laporan Khusus/Laporan Insidental |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: pidato Presiden dan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |
| | | 03 | Laporan Perkembangan (<i>Progress Report</i>) |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun). |
| PS | PERPUSTAKAAN | | |
| | 01 | Pengadaan Bahan Pustaka | |
| | | 01 | Pembelian Bahan Pustaka |
| | | | Naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui pembelian mulai dari penyusunan daftar pemesanan buku, pengajuan usulan sampai dengan pembelian termasuk berita acara serah terima buku. |
| | | 02 | Hibah |
| | | | Naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui hibah. |
| | | 03 | Sumbangan |
| | | | Naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui sumbangan dari instansi lain. |
| | | 04 | Kerjasama |
| | | | Naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui kerjasama dengan kementerian/lembaga lain. |
| | 02 | Pengolahan Bahan Pustaka | |
| | | 01 | Inventarisasi |
| | | | Naskah terkait proses penginputan data bahan pustaka ke buku induk, katalogisasi, penyusunan data bibliografi, penentuan abstrak dan labelisasi bahan pustaka. |
| | | 02 | Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka |
| | | | Naskah terkait kegiatan pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka. |
| | | 03 | <i>Stock Opname</i> |
| | | | Naskah terkait kegiatan <i>stock opname</i> . |

| | | |
|----|--------------|---|
| | 04 | Penyiangan |
| | | Naskah terkait kegiatan penyiangan bahan pustaka. |
| | 03 | Layanan Perpustakaan |
| | 01 | Sirkulasi Bahan Pustaka |
| | | Naskah terkait sirkulasi bahan pustaka meliputi peminjaman bahan pustaka, layanan rujukan, dan literasi informasi termasuk penyusunan kartu buku. |
| | 02 | Keanggotaan Perpustakaan |
| | | Naskah terkait dengan keanggotaan perpustakaan mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberhentian. |
| PH | PRODUK HUKUM | |
| | 01 | Program Legislasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan program legislasi yang dilakukan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| | 02 | Produk Hukum |
| | 01 | Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur. |
| | 02 | Produk Hukum yang Bersifat Penetapan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan). |
| | 03 | Instruksi/Surat Edaran |
| | | Naskah yang berkaitan dengan Instruksi/Surat Edaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 04 | Surat Perintah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan Surat Perintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 03 | Perjanjian Kerjasama |
| | 01 | Perjanjian Dalam Negeri |
| | | Naskah yang berkaitan dengan perjanjian Kerjasama Dalam Negeri yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 02 | Perjanjian Luar Negeri |
| | | Naskah yang berkaitan dengan perjanjian Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 04 | Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum |
| | 01 | Dokumentasi Produk Hukum |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan dan kegiatan dokumentasi produk hukum. |
| | 02 | Publikasi Produk Hukum |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan dan kegiatan publikasi produk hukum seperti kegiatan sosialisasi produk hukum dan penyebarluasan produk/instrumen hukum kepada lembaga, masyarakat, dan/atau perorangan. |
| | 05 | Telaah Produk Hukum/Perjanjian/Akta |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penelaahan produk hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian termasuk telaah perjanjian dan akta dan penelaahan produk hukum di Bidang Perekonomian. |
| | 06 | Pemberian Pertimbangan Hukum |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan fasilitasi pemberian pertimbangan hukum. |
| | 07 | Advokasi Hukum |
| | 01 | Advokasi Hukum Kasus Perdata |
| | | Naskah terkait dengan bantuan hukum kasus perdata yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 02 | Advokasi Hukum Kasus Pidana |
| | | Naskah terkait dengan bantuan hukum kasus pidana yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 03 | Advokasi Hukum Kasus Tata Usaha Negara |
| | | Naskah terkait dengan bantuan hukum kasus Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| OT | ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | |
| | 01 | Organisasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penataan organisasi |
| | 02 | Uraian Tugas |
| | | Naskah yang berkaitan dengan uraian tugas masing-masing unit kerja, jabatan struktural, fungsional dan pelaksana. |
| | 03 | Penataan Instrumen Jabatan |
| | 01 | Analisis Jabatan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan informasi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. |
| | 02 | Analisis Beban Kerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan data beban kerja jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. |
| | 03 | Standar Kompetensi Jabatan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. |
| | 04 | Peta Jabatan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan peta jabatan. |
| | 05 | Evaluasi Jabatan |

| | | |
|----|-------------|--|
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan informasi faktor jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. |
| | 04 | Penataan Tata Laksana |
| | | Naskah yang berkaitan dengan rencana kebutuhan penataan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 01 | Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses analisis penyusunan dan evaluasi proses bisnis. |
| | 02 | Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penyempurnaan SOP Administrasi Pemerintahan. |
| | 03 | <i>Monitoring</i> dan Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses <i>monitoring</i> /pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP Administrasi Pemerintahan. |
| | 04 | Penyusunan dan Penyempurnaan Instrumen atau Pedoman Ketatalaksanaan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penyempurnaan instrumen atau pedoman kerja (Fasilitasi Ketatalaksanaan). |
| | 05 | Manajemen Reformasi Birokrasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi, dan pelaporan kemajuan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian termasuk penetapan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 01 | Perencanaan Reformasi Birokrasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan perencanaan reformasi birokrasi. |
| | 02 | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. |
| | 03 | Evaluasi Reformasi Birokrasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan <i>monitoring</i> dan evaluasi reformasi birokrasi. |
| SD | PERSIDANGAN | |
| | 01 | Rapat Koordinasi Tingkat Menteri |
| | 01 | Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor Tingkat Menteri) |
| | | Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. |
| | 02 | Rapat Terbatas Tingkat Menteri (Ratas Tingkat Menteri) |

| | | | |
|--|----|--|---|
| | | | Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Terbatas Tingkat Menteri, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. |
| | | 03 | Rapat Menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| | | | Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM), termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. |
| | 02 | Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya | |
| | | | Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. |
| | 03 | Rapat Internal Staf | |
| | | 01 | Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
| | | | Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. |
| | | 02 | Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| | | | Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. |
| | 04 | Penyiapan Naskah Menteri | |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, penyiapan, pengolahan, harmonisasi, penyampaian informasi perkembangan kebijakan di bidang perekonomian, penatausahaan dan digitalisasi naskah kegiatan Menteri. |
| | | 01 | Pengumpulan Bahan Naskah Menteri |
| | | | Naskah terkait pengumpulan dan penyiapan bahan naskah kegiatan Menteri, serta penyampaian informasi perkembangan kebijakan di bidang perekonomian. |
| | | 02 | Pengolahan dan Harmonisasi Bahan Naskah Menteri |

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| | | | Naskah terkait pengolahan dan harmonisasi bahan naskah Menteri serta penyajian dokumen naskah kegiatan Menteri. |
| | | 03 | Dokumentasi Naskah Menteri |
| | | | Naskah terkait penatausahaan dan digitalisasi naskah kegiatan Menteri. |
| HM | KEHUMASAN | | |
| | 01 | Peliputan dan Dokumentasi | |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa penting dalam berbagai media seperti foto, video, rekaman suara, dan multimedia. | |
| | 02 | Penyajian Informasi | |
| | | 01 | Publikasi |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan publikasi informasi dan kebijakan di bidang perekonomian serta hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya, serta pengelolaan dokumentasi. |
| | | 02 | Sayembara/Lomba Pembuatan Logo Lembaga |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sayembara/lomba pembuatan logo lembaga. |
| | | 03 | Penerbitan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan bulletin/majalah/jurnal/surat kabar/naskah sumber/karya ilmiah dan populer serta kegiatan lain semacamnya mulai dari perencanaan sampai penyebaran. |
| | | 04 | Pers/Media Massa |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan masalah penerangan yang dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain semacamnya berupa wawancara dan konferensi pers/ <i>press release</i> dari pemberitaan lain. |
| | 03 | Keterbukaan Informasi Publik | |
| | | Naskah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik termasuk didalamnya pengelolaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. | |
| | 04 | Hubungan Antar Lembaga | |
| | | 01 | Lembaga Negara |
| | | | Naskah terkait hubungan antar lembaga dengan Kementerian/Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah. |
| | | 02 | Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat |
| | | | Naskah terkait hubungan antar lembaga dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat. |
| | | 03 | Perusahaan/Badan Usaha |
| | | | Naskah terkait hubungan antar lembaga dengan perusahaan/badan usaha. |
| | | 04 | Perguruan Tinggi/Sekolah |

| | | | |
|----|--------------|---|---|
| | | | Naskah terkait hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi/sekolah. |
| | | 05 | Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan dan/atau forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. |
| | 05 | Tanda Penghargaan, Kenang-kenangan, dan Ucapan | |
| | | 01 | Penghargaan/tanda kenang-kenangan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda penghargaan dan kenang-kenangan kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara yang memiliki jasa prestasi besar. |
| | | 02 | Ucapan duka/terima kasih/permohonan maaf |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan ucapan (terima kasih, bela sungkawa, atau permohonan maaf) kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara. |
| | 06 | Dokumen <i>Hosting</i> | |
| | | Naskah yang terkait dengan pengelolaan <i>website</i> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. | |
| | 07 | Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> DPR | |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Dengar pendapat/ <i>Hearing</i> dengan DPR. | |
| | 08 | Edukasi Publik | |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan edukasi publik mengenai kebijakan terkait isu di bidang perekonomian. | |
| | 09 | Manajemen Strategi Komunikasi | |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. | |
| | 10 | <i>Monitoring</i> dan Analisis Berita | |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, penelaahan, dan pengendalian berita di bidang perekonomian. | |
| | 11 | Layanan Pengaduan dan Informasi Publik | |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik. | |
| RT | RUMAH TANGGA | | |
| | 01 | Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | |
| | | 01 | Gedung dan Bangunan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan gedung, auditorium/aula, ruang rapat, rumah dinas, dan wisma. |
| | | 02 | Kendaraan Dinas |

| | | |
|----|---------------|--|
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas termasuk kendaraan dinas yang dilaksanakan dengan sewa. |
| | 03 | Instalasi/jaringan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan sarana instalasi air/ listrik/telekomunikasi, <i>Local Area Network</i> (LAN), penerangan, dan peralatan kantor lainnya. |
| | 02 | Keamanan dan Ketertiban |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban kantor, termasuk pengelolaan parkir. |
| | 03 | Pelayanan Rapat dan Urusan Dalam |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan rapat dan urusan dalam seperti permintaan pelayanan, proses pelayanan rapat, konsumsi rapat termasuk pertanggungjawabannya. |
| | 04 | Pertamanan dan Kebersihan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pengelolaan kebersihan gedung dan taman. |
| TU | KETATAUSAHAAN | |
| | 01 | Persuratan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan persuratan. |
| | 01 | Pengelolaan Persuratan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan persuratan. |
| | 02 | Pembinaan Persuratan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pembinaan persuratan termasuk pengurusan surat masuk dan surat keluar. |
| | 02 | Permintaan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri |
| | | Naskah yang berkaitan dengan permintaan ijin perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 03 | Kearsipan |
| | | Naskah yang terkait dengan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 01 | Pengelolaan Arsip Dinamis |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penciptaan, penggunaanm pemeliharaan, penataan, penyimpanan, dan layanan arsip dinamis. |
| | 02 | Alih Media Arsip |
| | | Naskah yang berkaitan dengan alih media arsip. |
| | 03 | Pengelolaan Arsip Vital |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan seleksi, perlindungan, dan pemulihan. |
| | 04 | Pemindahan Arsip |

| | | |
|----|---------------------------|--|
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemindahan arsip. |
| | 05 | Pemusnahan Arsip |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemusnahan arsip. |
| | 06 | Penyerahan Arsip |
| | | Naskah yang berkaitan dengan Penyerahan arsip. |
| | 07 | Pembinaan dan Konsultasi Kearsipan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan konsultasi kearsipan. |
| | 04 | <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Sistem Kearsipan |
| | | Naskah yang berkaitan tentang kegiatan <i>monitoring/</i> pengawasan dan evaluasi sistem kearsipan yang diterapkan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 05 | Keprotokolan |
| | 01 | Upacara/Acara Kedinasan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan, dan apel. |
| | 02 | Agenda Pimpinan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan. |
| | 03 | Kunjungan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam negeri dan luar negeri Menteri. |
| | 04 | Sambutan/Pidato |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi dan penyiapan sambutan/pidato meliputi bahan sambutan/pidato Presiden di Bidang Perekonomian termasuk sambutan/pidato Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/pejabat pimpinan tinggi madya serta bahan paparan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 06 | Tata Usaha |
| | 01 | Tata Usaha Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi Tata Usaha Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 02 | Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 03 | Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus. |
| BM | BARANG MILIK NEGARA (BMN) | |
| | 01 | Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa |

| | | |
|--|----|---|
| | | Naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan analisis kebutuhan peralatan BMN dari tiap unit kerja. |
| | 02 | Pengadaan Barang dan Jasa |
| | 01 | Pengadaan Barang Habis Pakai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pengadaan barang habis pakai. |
| | 02 | Pengadaan Barang Bergerak/Barang Inventaris |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pengadaan barang bergerak/barang inventaris. |
| | 03 | Pengadaan Tanah dan Bangunan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pengadaan tanah dan bangunan. |
| | 04 | Pengadaan Jasa |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi pengadaan jasa. |
| | 05 | Pengadaan <i>Software</i> |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi pengadaan <i>software</i> . |
| | 03 | Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) |
| | 01 | Pejabat Pengguna BMN |
| | | Naskah yang terkait dengan proses penetapan Kuasa Pengguna BMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 02 | Pembukuan BMN |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses pembukuan meliputi pendaftaran dan pencatatan BMN dan penyusunan daftar barang penguasaan/daftar Barang Kuasa Pengguna dan daftar BMN. |
| | 03 | Inventarisasi BMN |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 04 | Pergudangan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pergudangan, meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran dari gudang. |
| | 05 | Penggunaan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 06 | Pemanfaatan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. yang meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. |
| | 07 | Pengamanan dan Pemeliharaan BMN |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengamanan BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, termasuk |

| | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| | | | pelaporan kerusakan, dan pemeliharaan/perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan server/hosting, dan perbaikan kendaraan dinas. |
| | | 08 | Penilaian |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | | 09 | Pemindahtanganan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan proses pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | | 10 | Pemusnahan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan proses pengusulan pemusnahan, persetujuan, dan pelaksanaan pemusnahan BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | | 11 | Penghapusan BMN |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN mulai dari persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan, sampai dengan pelaporan. |
| | | 12 | Laporan BMN |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan BMN yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan. |
| | 04 | Pengawasan dan Pengendalian BMN | |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN. | |
| | 05 | Penatausahaan Barang Persediaan | |
| | | 01 | Pengadaan Barang Persediaan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang persediaan, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang. |
| | | 02 | Distribusi Barang Persediaan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendistribusian barang persediaan. |
| | | 03 | Laporan Barang Persediaan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan Barang Persediaan yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan. |
| | | 04 | Standar Harga Barang Persediaan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan pembuatan standar harga barang persediaan. |
| KU | ADMINISTRASI KEUANGAN | | |
| | 01 | Pelaksanaan Anggaran | |
| | | 01 | Pejabat Pengelola Keuangan |

| | | |
|--|----|---|
| | | Naskah yang berkaitan dengan pejabat pengelola keuangan berupa penetapan: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kuasa pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, staf pengelola keuangan. |
| | 02 | Pengeluaran Anggaran/Belanja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran anggaran/belanja, mulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), termasuk naskah terkait petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). |
| | 03 | Penggajian dan Tunjangan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai berupa daftar gaji pegawai, kartu gaji, dan bukti pembayarannya serta tunjangan pegawai. |
| | 04 | Tunjangan Kinerja dan Uang Makan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengurusan tunjangan kinerja dan uang makan. |
| | 02 | Pengelolaan Perbendaharaan |
| | 01 | Pajak |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran pajak. |
| | 02 | Pembukuan Anggaran |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan, termasuk Rekening Koran Bank, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas Laporan Pendapatan Negara, dan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran, Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. |
| | 03 | Rekening Pemerintah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan rekening pemerintah. |
| | 04 | Verifikasi Anggaran |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran. |
| | 05 | Pinjaman/Bantuan/Hibah Luar Negeri |
| | | Naskah Dinas yang berkaitan dengan pinjaman/bantuan/ hibah dari luar negeri. |
| | 03 | Ketatausahaan Keuangan |

| | | |
|----|-------------|---|
| | | Naskah yang berkaitan dengan dengan kegiatan permintaan dan penerbitan Keterangan Penghasilan, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) serta permohonan pinjaman. |
| | 04 | Laporan Keuangan |
| | 01 | Laporan Keuangan Bulanan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan bulanan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). |
| | 02 | Laporan Keuangan Triwulanan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan triwulanan yang terdiri dari LRA, Neraca, dan CALK. |
| | 03 | Laporan Keuangan Semesteran |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan semesteran yang terdiri dari LRA, Neraca, dan CALK. |
| | 04 | Laporan Keuangan Tahunan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari LRA, Neraca, dan CALK. |
| | 05 | Sistem Akuntansi Instansi (SAI) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan SAI. |
| | 05 | Pertanggungjawaban Keuangan Negara |
| | 01 | Laporan Hasil Pemeriksaan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan tindak lanjutnya. |
| | 02 | Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. |
| KP | KEPEGAWAIAN | |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan perencanaan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, dan pelaksanaan penerapan disiplin dan kesejahteraan pegawai. |
| | 01 | Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara termasuk dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). |
| | 01 | Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara |
| | | Naskah yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara dan PPPK. |
| | 02 | Perencanaan Pertimbangan Formasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan perencanaan pertimbangan penetapan formasi Aparatur Sipil Negara. |
| | 03 | Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara |

| | | | |
|--|----|--|---|
| | | | Naskah yang berkaitan dengan penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara. |
| | | 04 | Standardisasi Jabatan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan standardisasi Jabatan antara lain Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan dan Klasifikasi Jabatan. |
| | 02 | Formasi Pegawai | |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan formasi pegawai. | |
| | 03 | Pengadaan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil | |
| | | 01 | Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk PPPK. |
| | | 02 | Penetapan Pengumuman Kelulusan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan penetapan pengumuman kelulusan. |
| | | 03 | Berkas Lamaran yang Tidak Diterima |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima. |
| | | 04 | Nota Usul Pengangkatan Aparatur Sipil Negara |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan. |
| | 04 | Seleksi Terbuka Jabatan | |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penerimaan pejabat mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan. | |
| | 05 | Mutasi Pegawai | |
| | | 01 | Alih Tugas |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | | 02 | Kenaikan Pangkat/Golongan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | | 03 | Kenaikan Gaji Berkala (KGB) |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan KGB. |
| | | 04 | Usulan Peninjauan Masa Kerja |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji. |
| | | 05 | Mutasi Keluarga |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan usulan dan penetapan penyesuaian tunjangan Keluarga termasuk proses pengurusan surat izin pernikahan/perceraian. |
| | | 06 | Promosi |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan. |
| | | 07 | Rotasi |

| | | |
|--|----|--|
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pementapan tugas. |
| | 08 | Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil |
| | | Naskah yang berkaitan dengan proses pertimbangan jabatan dan pangkat. |
| | 06 | Pengangkatan dan Pemberhentian |
| | 01 | Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural. |
| | 02 | Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional. |
| | 03 | Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan pelaksana. |
| | 07 | Pendelegasian Wewenang (Plt/Plh) |
| | 01 | Pelaksana Tugas (Plt) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan yang belum diisi secara definitif. |
| | 02 | Pelaksana Harian (Plh) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, cuti, sakit, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan). |
| | 08 | Pengembangan Karir Pegawai |
| | 01 | Kompetensi Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kompetensi pegawai termasuk penilaian kompetensi pegawai dan ujian kompetensi/ <i>Assesment test</i> . |
| | 02 | Pemetaan/ <i>talent mapping</i> pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan/ <i>talent mapping</i> pegawai. |
| | 03 | Ujian Penyesuaian Ijazah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai. |
| | 04 | Ujian Dinas |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai. |
| | 05 | Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelatihan penjenjangan. |
| | 06 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional/Kursus |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional/kursus. |

| | | |
|--|----|---|
| | 07 | Tugas Belajar |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai berupa tugas belajar. |
| | 08 | Izin Belajar |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai berupa izin belajar. |
| | 09 | Angka Kredit |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penilaian dan penetapan angka kredit. |
| | 09 | Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| | 01 | Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja ASN dan standar kerja. |
| | 02 | Standar Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan usul dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. |
| | 03 | Pengelolaan <i>Database</i> dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai ASN |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN, analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN dan Teknis penilaian kinerja ASN. |
| | 04 | Hasil Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja Pegawai ASN dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai ASN |
| | | Naskah yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja pegawai ASN dan standar kinerja jabatan pegawai ASN. |
| | 10 | Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN |
| | 01 | Kode Etik Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kode etik pegawai. |
| | 02 | Disiplin Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai berupa daftar hadir pegawai, rekapitulasi daftar hadir, laporan disiplin pegawai, surat keterangan ketidakhadiran/hadir dan pulang tidak pada waktunya, dan pemantauan disiplin pegawai lainnya. |
| | 03 | Pemberhentian Pegawai dengan Hormat |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, penyederhanaan organisasi, dan tidak cakap jasmani dan rohani. |
| | 04 | Pemberhentian Pegawai dengan Tidak Hormat |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan |

| | | |
|--|----|--|
| | | sumpah/janji jabatan, dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. |
| | 05 | Pemberhentian Pegawai Sementara |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian sementara pegawai. |
| | 06 | Pensiun ASN |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi pensiun pegawai ASN, perekaman dan pemeliharaan data pensiun, penetapan pensiun ASN, penetapan pertimbangan teknis pensiun ASN. |
| | 11 | Bantuan Hukum Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum pegawai. |
| | 12 | Status dan Kedudukan Pegawai |
| | 01 | Status dan Kedudukan Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian. |
| | 02 | Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan keberatan pegawai. |
| | 03 | Perselisihan/Sengketa Kepegawaian |
| | | Naskah yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa kepegawaian termasuk pengajuan keberatan pegawai serta bantuan/advokasi hukum bagi pegawai. |
| | 13 | Sistem Informasi Kepegawaian |
| | 01 | Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan database kepegawaian ASN, penyelesaian permasalahan data kepegawaian, penyajian informasi kepegawaian ASN dan non ASN dan pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik. |
| | 02 | Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian fisik. |
| | 03 | Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian elektronik. |
| | 14 | Administrasi Pegawai |
| | 01 | Data/Keterangan Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai. |
| | 02 | Cuti |
| | | Naskah yang berkaitan dengan cuti pegawai. |
| | 03 | Kartu Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai. |

| | | |
|----|--------------------------|--|
| | 04 | Kartu Istri/Kartu Suami |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu). |
| | 05 | Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan KP4. |
| | 06 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan LHKPN dan LHKASN. |
| | 07 | Daftar Urut Kepangkatan (DUK) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan DUK. |
| 15 | Kesejahteraan Pegawai | |
| | 01 | Pemeliharaan Kesehatan Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai. |
| | 02 | Bantuan Sosial |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah. |
| | 03 | Konsultasi dan Pembinaan Mental Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan konsultasi pegawai dan bimbingan mental pegawai termasuk didalamnya kegiatan keagamaan dan <i>capacity building</i> . |
| | 04 | <i>Medical record</i> |
| | | Naskah yang berkaitan dengan <i>medical record</i> pegawai. |
| | 05 | Olahraga/Kesenian/Rekreasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga/kesenian/rekreasi. |
| | 06 | Fasilitas Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas pegawai. |
| | 07 | Tabungan Pensiun (Taspen) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pembuatan kartu dan layanan Taspen. |
| | 08 | Tabungan Perumahan (Bapetarum) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan layanan Tabungan Perumahan. |
| | 09 | Penghargaan dan Tanda Jasa |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan seperti piagam/tanda jasa (Bintang Satyalencana dan sejenisnya). |
| | 10 | Administrasi Pakaian Dinas |
| | | Naskah yang berkaitan dengan administrasi pakaian dinas. |
| 16 | Organisasi Non Kedinasan | |
| | 01 | Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) |

| | | | |
|----|------------|---|---|
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | | 02 | Dharma Wanita |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma Wanita Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | | 03 | Koperasi |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Koperasi. |
| | 17 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan penerimaan PPPK mulai dari usulan dari unit kerja, pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan penerimaan, penempatan, pendataan serta pembinaannya. |
| | 18 | Pengarutamaan Gender | |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pengarusutamaan gender. |
| | 19 | Berkas Perseorangan | |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai mulai lamaran sampai dengan pensiun pegawai. |
| PW | PENGAWASAN | | |
| | 01 | Perencanaan Kebijakan Pengawasan | |
| | | 01 | Perencanaan Pengawasan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan rencana pengawasan mulai dari penyusunan, penetapan sampai dengan pemantauan rencana, dan program pengawasan. |
| | | 02 | Kerjasama Pengawasan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan sampai dengan penetapan kerjasama pengawasan. |
| | 02 | Audit/Pemeriksaan | |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan audit/pemeriksaan mulai dari penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. |
| | | 01 | Audit Kinerja |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja yang meliputi audit kepegawaian, audit pengelolaan keuangan negara, audit pengelolaan BMN, dan audit LAKIP. |
| | | 02 | Audit dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Khusus |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus. |
| | | 03 | <i>Probity Audit</i> |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. |
| | | 04 | Audit atas Aspek Keuangan Tertentu |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit atas aspek keuangan tertentu. |

| | | |
|--|----|--|
| | 05 | Audit (TIK) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). |
| | 03 | Reviu |
| | | Naskah yang berkaitan dengan reviu, mulai dari penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. |
| | 01 | Reviu Laporan Keuangan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu laporan keuangan. |
| | 02 | Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RKA-KL dan reviu revisi RKA-KL. |
| | 03 | Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa. |
| | 04 | Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RK-BMN. |
| | 05 | Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 04 | Evaluasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan evaluasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. |
| | 01 | Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Eselon I |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I. |
| | 02 | Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi PMPRB. |
| | 03 | Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP. |
| | 04 | Evaluasi Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian kapabilitas APIP. |
| | 05 | Evaluasi Penilaian Zona Integritas (ZI) |

| | | |
|--|----|--|
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian ZI. |
| | 06 | Evaluasi Terpisah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi terpisah. |
| | 05 | Pemantauan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan laporan penyelesaian TP-TGR dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP) sampai dengan pelaporan. |
| | 01 | Tindak Lanjut <i>Monitoring</i> Hasil Pemeriksaan Internal |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara. |
| | 02 | Tindak Lanjut <i>Monitoring</i> Hasil Pemeriksaan Eksternal |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara. |
| | 03 | Pengaduan Masyarakat |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 04 | Pemantauan Disiplin Pegawai |
| | | Naskah yang berkaitan dengan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 06 | Pengawasan Lainnya |
| | 01 | Pedoman Pengawasan Internal |
| | | Naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman terkait kegiatan pengawasan sampai dengan penetapan, bimbingan teknis, maupun sosialisasinya. |
| | 02 | Pembinaan Komitmen Anti Korupsi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan Pembinaan komitmen anti korupsi antara lain meliputi, pencanangan/penguatan Zona Integritas (ZI), program dan kegiatan wilayah bebas dari korupsi (WBK), penilaian dan penetapan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sosialisasi anti korupsi, kampanye anti korupsi, penerapan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) penetapan pejabat anti korupsi dan sebagainya. |
| | 03 | <i>Whistleblowing System</i> |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, penerapan serta penguatan <i>Whistleblowing System</i> di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 04 | Pendampingan Pemeriksaan BPK RI |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | | Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan pemeriksaan BPK RI kepada unit kerja. |
| | | 05 | Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). |
| | | 06 | Pengelolaan Gratifikasi |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi. |
| | | 07 | Forum Pengawasan |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan forum pengawasan. |
| | | 08 | SP4N LAPOR |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan penanganan pengaduan melalui aplikasi SP4N LAPOR. |
| | | 09 | Manajemen Risiko |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan manajemen risiko Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai dari penyusunan matriks manajemen risiko hingga <i>monitoring</i> dan evaluasi. |
| | | 10 | Telaah Sejawat |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan kegiatan APIP dalam rangka penjaminan dan pengembangan mutu instansi (dinilai/menilai APIP K/L lain) |
| | | 11 | Peran Konsultansi |
| | | | Naskah yang berkaitan dengan konsultansi/pendampingan. |

FUNGSI SUBSTANTIF

| | | |
|----|----------------------------|--|
| EK | EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN | |
| | 01 | Fiskal |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang fiskal. |
| | 01 | Penerimaan Pajak |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penerimaan perpajakan. |
| | 02 | Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang negara bukan pajak. |
| | 03 | Pengeluaran Negara |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengeluaran negara. |
| | 04 | Pembiayaan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pembiayaan. |
| | 05 | Insentif Fiskal |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang insentif fiskal. |
| | 06 | Analisis Kebijakan Fiskal |
| | | Naskah yang berkaitan dengan analisis kebijakan fiskal. |
| | 02 | Moneter, Neraca Pembayaran, dan Sektor Eksternal |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang moneter, neraca pembayaran, dan sektor eksternal. |
| | 01 | Stabilitas Moneter |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang stabilitas moneter. |
| | 02 | Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan serta sistem pembayaran. |
| | 03 | Neraca Pembayaran |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang neraca pembayaran. |
| | 04 | Posisi Investasi Internasional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang posisi investasi internasional. |
| | 05 | Stabilitas Harga |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengendalian inflasi dan stabilitas harga. |

| | | |
|--|----|---|
| | 06 | Transaksi Berjalan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang transaksi berjalan. |
| | 07 | Transaksi Finansial dan Modal |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang transaksi finansial dan modal. |
| | 03 | Perekonomian Daerah dan Sektor Riil |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil. |
| | 01 | Ekonomi Kawasan Barat Indonesia |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang ekonomi kawasan barat Indonesia. |
| | 02 | Ekonomi Kawasan Timur Indonesia |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang ekonomi kawasan timur Indonesia. |
| | 03 | Kebijakan dan Pengembangan Sektor Riil Barang |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan sektor riil barang. |
| | 04 | Kebijakan dan Pengembangan Sektor Riil Jasa |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan sektor riil jasa. |
| | 05 | Kebijakan Ekonomi Daerah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perekonomian daerah. |
| | 06 | Pengembangan Ekonomi Daerah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian daerah. |
| | 04 | Pasar Modal dan Lembaga Keuangan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan serta pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional. |
| | 01 | Pasar Modal |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pasar modal. |
| | 02 | Asuransi dan Lembaga Keuangan Bukan Bank |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perasuransian dan lembaga keuangan bukan bank. |

| | | |
|--|----|---|
| | 03 | Perbankan Umum |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perbankan umum. |
| | 04 | Perbankan Syariah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perbankan syariah. |
| | 05 | Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pembiayaan UMKM dan sektor lainnya. |
| | 06 | Analisis Kebijakan dan Pengembangan Perbankan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan analisis kebijakan dan pengembangan perbankan. |
| | 05 | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang BUMN. |
| | 01 | Usaha Agro dan Industri Strategis |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang usaha agro dan industri strategis. |
| | 02 | Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan. |
| | 03 | Usaha Jasa Keuangan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang usaha jasa keuangan. |
| | 04 | Usaha Jasa Non Keuangan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang usaha jasa non keuangan. |
| | 05 | BUMN di bidang Minyak, Gas, dan Petrokimia |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang BUMN minyak, gas, dan petrokimia. |
| | 06 | BUMN di bidang Pertambangan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang BUMN pertambangan. |
| | 07 | BUMN di bidang Farmasi dan Pariwisata |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang BUMN farmasi dan pariwisata. |
| | 08 | BUMN di bidang Industri Informasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang BUMN industri informasi. |

| | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| | 09 | BUMN di bidang Utilitas |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang BUMN utilitas. |
| | 10 | BUMN di bidang Industri Manufaktur |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang BUMN industri manufaktur. |
| | 11 | BUMN di bidang Niaga |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang BUMN niaga. |
| | 12 | BUMN di bidang Transportasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang BUMN transportasi. |
| | 06 | Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah. |
| | 01 | Kebijakan Keuangan Inklusif |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan keuangan inklusif. |
| | 02 | Pengembangan Keuangan Inklusif |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan keuangan inklusif. |
| | 03 | Kebijakan Keuangan Syariah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan keuangan syariah. |
| | 04 | Pengembangan Keuangan Syariah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan keuangan syariah. |
| TAN | PANGAN, PERTANIAN, DAN AGRIBISNIS | |
| | 01 | Pangan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pangan. |
| | 01 | Produksi dan Distribusi Pangan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang produksi dan distribusi pangan. |
| | 02 | Konsumsi dan Cadangan Pangan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang konsumsi dan cadangan pangan. |
| | 02 | Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan. |

| | | |
|--|----|--|
| | 01 | Produksi dan Distribusi Peternakan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang produksi dan distribusi peternakan. |
| | 02 | Produksi dan Distribusi Perikanan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang produksi dan distribusi perikanan. |
| | 03 | Pengembangan Agribisnis Perkebunan dan Pengembangan Agribisnis Hortikultura |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan dan pengembangan agribisnis hortikultura. |
| | 01 | Perkebunan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perkebunan. |
| | 02 | Hortikultura |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang hortikultura. |
| | 03 | Sayuran dan Tanaman Obat |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang sayuran dan tanaman obat. |
| | 04 | Buah dan Florikultura |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang buah dan florikultura. |
| | 05 | Kelapa Sawit |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kelapa sawit. |
| | 06 | Tanaman Perkebunan Lainnya |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang tanaman perkebunan lainnya. |
| | 04 | Prasarana dan Sarana Pangan, Agribisnis dan Pertanian |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan pertanian. |
| | 01 | Prasarana Pangan dan Pertanian |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang prasarana pangan dan pertanian. |
| | 02 | Sarana Pangan dan Pertanian |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang sarana pangan dan pertanian. |
| | 05 | Agribisnis |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang agribisnis. |

| | | |
|-----|---|---|
| | 01 | Pembiayaan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pembiayaan. |
| | 02 | Kelembagaan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kelembagaan. |
| ENG | PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | 01 | Produktivitas Energi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang produktivitas energi. |
| | 01 | Produktivitas Hulu Energi Konvensional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang produktivitas hulu energi konvensional. |
| | 02 | Produktivitas Hilir Energi Konvensional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang produktivitas hilir energi konvensional. |
| | 03 | Produktivitas Hulu Energi Non Konvensional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang produktivitas hulu energi non konvensional. |
| | 04 | Produktivitas Hilir Energi Non Konvensional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang produktivitas hilir energi non konvensional. |
| | 02 | Infrastruktur Energi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur energi. |
| | 01 | Eksplorasi, Produksi, dan Transmisi Energi Konvensional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang eksplorasi, produksi, dan transmisi energi konvensional. |
| | 02 | Pengolahan dan Distribusi Energi Konvensional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengolahan dan distribusi energi konvensional. |
| | 03 | Eksplorasi, Produksi, dan Transmisi Energi Non Konvensional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang eksplorasi, produksi, dan transmisi energi non konvensional. |
| | 04 | Pengolahan dan Distribusi Energi Non Konvensional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengolahan dan distribusi energi non konvensional. |
| | 03 | Industri Ekstraktif |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang industri ekstraktif. |

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| | 01 | Industri Ekstraktif Energi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang industri ekstraktif energi. |
| | 02 | Industri Ekstraktif Mineral |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang industri ekstraktif mineral. |
| | 04 | Tata Kelola Kehutanan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang tata kelola kehutanan. |
| | 01 | Hasil Hutan Kayu |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang hasil hutan kayu. |
| | 02 | Hasil Hutan Non Kayu |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang hasil hutan non kayu. |
| | 03 | Penggunaan Kawasan Hutan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan. |
| | 04 | Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Hutan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan. |
| | 05 | Pelestarian Lingkungan Hidup |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup. |
| | 01 | Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pencegahan kerusakan lingkungan hidup. |
| | 02 | Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lingkungan hidup. |
| | 03 | Mitigasi Perubahan Iklim |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang mitigasi perubahan iklim. |
| | 04 | Adaptasi Perubahan Iklim |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim. |
| INV | PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI | |
| | 01 | Riset dan Inovasi |

| | | |
|-----|--|---|
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang riset dan inovasi. |
| | 01 | Minyak, Gas, Pertambangan, dan Petrokimia |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang riset dan inovasi minyak, gas, pertambangan, dan petrokimia. |
| | 02 | Agro, Farmasi, dan Pariwisata |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang riset dan inovasi agro, farmasi dan pariwisata. |
| | 03 | Jasa Keuangan dan Industri Informasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang riset dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi. |
| | 04 | Utilitas dan Industri Manufaktur |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang riset dan inovasi utilitas dan industri manufaktur. |
| | 05 | Niaga dan Transportasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang riset dan inovasi niaga dan transportasi. |
| KWU | EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN KEWIRAUSAHAAN DAN DAYA SAING KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | |
| | 01 | Pengembangan Ekonomi Kreatif |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif. |
| | 01 | Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan produk kreatif berbasis seni dan budaya. |
| | 02 | Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis seni dan budaya. |
| | 03 | Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan produk kreatif berbasis media, desain, dan iptek. |
| | 04 | Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis media, desain, dan iptek. |
| | 02 | Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan. |

| | | |
|--|----|--|
| | 01 | Promosi Potensi Bahan Baku Lokal |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang promosi potensi bahan baku lokal. |
| | 02 | Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Potensi Ekonomi Kawasan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang fasilitasi peningkatan nilai tambah potensi ekonomi kawasan. |
| | 03 | Perencanaan dan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kawasan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perencanaan dan kerjasama pengembangan ekonomi kawasan. |
| | 04 | Optimalisasi Pengembangan Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang optimalisasi pengembangan sarana pendukung ekonomi kawasan. |
| | 03 | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kewirausahaan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi. |
| | 01 | Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Wirausaha |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penyelesaian permasalahan pengembangan wirausaha. |
| | 02 | Penciptaan dan Pengembangan Peluang dan Pasar Wirausaha |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penciptaan dan pengembangan peluang dan pasar wirausaha. |
| | 03 | Penempatan dan Pembibitan Wirausaha |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penempatan dan pembibitan wirausaha. |
| | 04 | Inkubator Wirausaha |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang inkubator wirausaha. |
| | 05 | Ekosistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. |
| | 06 | Nilai Tambah Ekonomi Masyarakat |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. |
| | 04 | Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. |

| | | |
|--|----|---|
| | 01 | Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penguatan kelembagaan dan penyelesaian permasalahan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. |
| | 02 | Pengembangan Usaha Koperasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan usaha koperasi. |
| | 03 | Peningkatan Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peningkatan skala usaha mikro, kecil, dan menengah. |
| | 04 | Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. |
| | 05 | Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi. |
| | 06 | Restrukturisasi Usaha |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang restrukturisasi usaha. |
| | 07 | Pengembangan Produk dan Perluasan Akses Pasar |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan produk dan perluasan akses pasar. |
| | 05 | Ketenagakerjaan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagakerjaan. |
| | 01 | Pengembangan Peluang Kerja dan Penguatan Lembaga Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan peluang kerja dan penguatan lembaga peningkatan kapasitas tenaga kerja. |
| | 02 | Standar dan Sertifikasi Kompetensi, Pelatihan Kerja serta Kerja Sama Internasional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang standar dan sertifikasi kompetensi, pelatihan kerja serta kerja sama Internasional. |
| | 03 | Instruktur, Tenaga Pelatihan dan Pengembangan Lembaga Mediasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang instruktur, tenaga pelatihan dan pengembangan lembaga mediasi. |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| | 04 | Peningkatan dan Penguatan Kerja Sama Tenaga Kerja dan Perusahaan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peningkatan, penguatan dan pelatihan kerja sama tenaga kerja dan perusahaan. |
| | 06 | Ekonomi Digital |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi digital. |
| | 01 | Pengembangan Ekosistem |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan ekosistem. |
| | 02 | Literasi dan Inovasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang literasi dan inovasi. |
| | 03 | Transformasi Sektor Publik |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang transformasi sektor publik. |
| | 04 | Transformasi Sektor Privat |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang transformasi sektor privat. |
| | 07 | Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan |
| | 01 | Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. |
| | 02 | Penempatan Tenaga Kerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja. |
| | 03 | Harmonisasi Hubungan Industrial dan Pengawasan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan. |
| | 04 | Jaminan Sosial dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja. |
| PI | PERNIAGAAN DAN INDUSTRI | |
| | 01 | Pengembangan Investasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan investasi. |
| | 01 | Kemudahan dan Insentif Investasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kemudahan dan insentif investasi. |

| | | |
|--|----|---|
| | 02 | Perluasan dan Promosi Investasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perluasan dan promosi investasi. |
| | 02 | Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional. |
| | 01 | Peningkatan Ekspor |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peningkatan ekspor, pengembangan produk dan pasar ekspor. |
| | 02 | Fasilitasi Perdagangan Internasional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan Internasional. |
| | 03 | Fasilitasi dan Pengendalian Impor |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang fasilitasi dan pengendalian impor. |
| | 03 | Pengembangan Logistik Nasional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional. |
| | 01 | Kelembagaan Logistik Nasional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kelembagaan, perizinan dan informasi rantai pasok. |
| | 02 | Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Logistik |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik. |
| | 03 | Pengembangan Penyedia Jasa Logistik |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan penyedia jasa logistik. |
| | 04 | Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga. |
| | 01 | Pembinaan dan Penataan Pasar |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pembinaan dan penataan pasar. |
| | 02 | Penggunaan Produk Dalam Negeri |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penggunaan produk dalam negeri. |

| | | |
|--|----|---|
| | 03 | Persaingan Usaha |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang persaingan usaha. |
| | 04 | Perlindungan Konsumen |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. |
| | 05 | Perdagangan Dalam Negeri |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri. |
| | 06 | Tertib Niaga |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang tertib niaga. |
| | 05 | Pengembangan Industri |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan industri. |
| | 01 | Pengembangan Industri Padat Karya |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan industri padat karya. |
| | 02 | Pengembangan Teknologi Industri |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan teknologi industri. |
| | 03 | Industri Kecil, Menengah, dan Kawasan Industri |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang industri kecil menengah dan kawasan industri. |
| | 04 | Industri Berorientasi Ekspor |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang industri berorientasi ekspor. |
| | 05 | Industri Substitusi Impor |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang substitusi impor. |
| | 06 | Peningkatan Daya Saing Ekonomi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi. |
| | 01 | Peningkatan Iklim Usaha |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peningkatan iklim usaha. |
| | 02 | Perluasan Fasilitas |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perluasan fasilitas. |

| | | |
|-----|--|--|
| | 03 | Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peningkatan daya saing di sektor unggulan. |
| | 04 | Peningkatan Daya Saing Sektor Penunjang |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peningkatan daya saing sektor penunjang. |
| IPW | INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG | |
| | 01 | Infrastruktur Sumber Daya Air |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan dan penyediaan infrastruktur sumber daya air. |
| | 01 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. |
| | 02 | Pendayagunaan Sumber Daya Air |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pendayagunaan sumber daya air. |
| | 02 | Telematika dan Utilitas |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang telematika dan utilitas. |
| | 01 | Telematika |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang telematika. |
| | 02 | Utilitas |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang utilitas. |
| | 03 | Sistem Transportasi Multimoda |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dan sistem transportasi multimoda. |
| | 01 | Sistem Transportasi Jalan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang sistem transportasi jalan. |
| | 02 | Sistem Transportasi Non Jalan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang sistem transportasi non jalan. |
| | 04 | Penataan Ruang dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi. |

| | | |
|--|----|---|
| | 01 | Penataan Ruang |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perencanaan, penataan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. |
| | 02 | Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi. |
| | 03 | Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun |
| | 05 | Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, pengadaan tanah, pemanfaatan tanah dan pembiayaan infrastruktur. |
| | 01 | Perumahan dan Pertanahan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perumahan dan pertanahan. |
| | 02 | Pembiayaan Infrastruktur |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur. |
| | 06 | Penguatan Daya Saing Kawasan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan. |
| | 01 | Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang analisis kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi. |
| | 02 | Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi. |
| | 03 | Analisis Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kawasan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang analisis kebijakan peningkatan daya saing kawasan. |
| | 04 | Evaluasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kawasan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan. |
| | 07 | Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi. |
| | 01 | Analisis Kebijakan Ketahanan Kebencanaan |

| | | |
|-----|----------------------------------|--|
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang analisis kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah. |
| | 02 | Evaluasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah. |
| | 03 | Analisis Kebijakan Pemanfaatan Teknologi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang analisis kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah. |
| | 04 | Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah. |
| | 08 | Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan. |
| | 01 | Kebijakan Percepatan Pembangunan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang percepatan pembangunan. |
| | 02 | Kebijakan Pemanfaatan Pembangunan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pemanfaatan pembangunan. |
| KSI | KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL | |
| | 01 | Kerja Sama Ekonomi Asia |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia. |
| | 01 | Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Tengah. |
| | 02 | Kerja Sama Ekonomi Asia Timur |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Timur. |
| | 03 | Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Tenggara. |
| | 04 | Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Selatan. |
| | 02 | Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah |

| | | |
|--|----|--|
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa, Afrika dan Timur Tengah. |
| | 01 | Kerja Sama Ekonomi Eropa Barat |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Eropa Barat. |
| | 02 | Kerja Sama Ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur. |
| | 03 | Kerja Sama Ekonomi Afrika |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Afrika. |
| | 04 | Kerja Sama Ekonomi Timur Tengah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Timur Tengah. |
| | 03 | Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik. |
| | 01 | Kerja Sama Ekonomi Amerika Utara |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Amerika Utara. |
| | 02 | Kerja Sama Ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan. |
| | 03 | Kerja Sama Ekonomi Australia |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Australia. |
| | 04 | Kerja Sama Ekonomi <i>New Zealand</i> dan <i>Oceania</i> |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi <i>New Zealand</i> dan <i>Oceania</i> . |
| | 04 | Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi regional dan sub regional. |
| | 01 | Kerja Sama Ekonomi APEC |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi APEC. |
| | 02 | Kerja Sama Ekonomi Sub Regional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Sub Regional. |

| | | |
|----|------------------|---|
| | 03 | Kerja Sama Ekonomi Internal ASEAN |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi internal ASEAN. |
| | 04 | Kerja Sama Ekonomi Mitra Wicara ASEAN |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Mitra Wicara ASEAN. |
| | 05 | Kerja Sama Ekonomi Multilateral |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi multilateral. |
| | 01 | Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral. |
| | 02 | Kerja Sama Lembaga Pembiayaan Internasional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerja sama lembaga pembiayaan internasional. |
| | 03 | Kerja Sama Perdagangan dan Industri Multilateral |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama perdagangan dan industri multilateral. |
| | 04 | Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan |
| | | Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerja sama pembangunan berkelanjutan. |
| PK | PENUGASAN KHUSUS | |
| | KPE | Kebijakan Pemerataan Ekonomi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kebijakan pemerataan ekonomi. |
| | SNKI | Strategi Nasional Keuangan Inklusif |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait strategi nasional keuangan inklusif. |
| | PKLN | Pinjaman Komersial Luar Negeri |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait pinjaman komersial luar negeri. |
| | KUR | Kredit Usaha Rakyat |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kredit usaha rakyat. |
| | TPID | Tim Pengendalian Inflasi Daerah |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan pengendalian inflasi daerah. |
| | CPOPC | <i>Council of Palm Oil Producing Countries</i> |

| | | |
|--|--------|--|
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan <i>Council of Palm Oil Producing Countries</i> . |
| | eCom | Ekonomi Digital (<i>e-commerce</i>) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait ekonomi digital. |
| | Vok | Vokasi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait vokasi. |
| | PKE | Paket Kebijakan Ekonomi |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait paket kebijakan ekonomi. |
| | EoDB | Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan kemudahan berusaha termasuk <i>Online Single Submission</i> (OSS). |
| | OMP | Kebijakan Satu Peta (<i>One Map Policy</i>) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kebijakan sakears peta. |
| | KPPIP | Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. |
| | KEK | Kawasan Ekonomi Khusus |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kawasan ekonomi khusus. |
| | KEIN | Komite Ekonomi dan Industri Nasional |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait Komite Ekonomi dan Industri Nasional. |
| | EITI | Inisiasi Transparansi Industri Ekstraktif (<i>Extractive Industries Transparency Initiatives</i>) |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait inisiasi transparansi industri ekstraktif. |
| | EkUm | Ekonomi Umat |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait ekonomi umat. |
| | RefAgr | Reforma Agraria |
| | | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait reforma agraria. |

| | |
|--------|---|
| CK | Cipta Kerja |
| | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait cipta kerja. |
| PraKer | Kartu Prakerja |
| | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kartu prakerja. |
| FOLUR | <i>Food System, Land Use and Restoration (FOLUR) Impact Program</i> |
| | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan <i>Food System, Land Use and Restoration (FOLUR) Impact Program</i> . |
| PL | Penugasan Khusus Lainnya |
| | Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait penugasan khusus lainnya. |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002